



**PERATURAN DESA TUGUREJO
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN PENATAAN
TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA , PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEMPURAN
DESA TUGUREJO
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGUREJO
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARTAN DESA TUGUREJO
NOMOR : 180.192/01/KEP.BPD/13/2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TUGUREJO NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA
,PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGUREJO,

- Membaca : Peraturan Desa Tugurejo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Dan Penataan Tanah bengkok bagi Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa Tugurejo.
- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Desa Tugurejo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengeloalaan Kekayaan Desa dan Penataan Tanah Kas Bengkok bagi Kepala Desa Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa telah inspiratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui atas Peraturan Desa Tugurejo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dan Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa ;

- KEDUA : Agar setiap orang mengetahui Peraturan ini dengan penempatannya agar di undangkan dalam Lembaran Desa Tugurejo ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tugurejo
pada tanggal 3 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATN DESA TUGUREJO
KETUA

KHARIS MUSTOFA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Bagian Pemerintahan
3. Camat Tempuran
4. Kepala Desa Tugurejo



**PERATURAN DESA TUGUREJO
NOMOR : 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA
DESA ,PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUGUREJO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Kekayaan desa merupakan salah satu aset untuk menunjang pembangunan desa;
 - b. Bahwa tanah desa merupakan salah satu kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 03 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dan Perangkat Desa , Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya yang berasal dari Pengelolaan Tanah Bengkok;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, penatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa di tuangkan dalam peraturan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) ;
 5. Peraturan Desa Tugurejo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugurejo ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TUGUREJO

dan

KEPALA DESA TUGUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TUGUREJO TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adalah Desa Tugurejo
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tugurejo
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia'
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat

menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
23. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

- a. tanah Kas Desa yaitu Tanah Desa yang dikelola selain Oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai pembagian pengelolaan Tanah Desa yang tercantum dalam lampiran peraturan Desa ini;
 - b. pasar Desa;
 - c. bangunan Desa;
 - d. lain-lain kekayaan milik Desa
- (2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III

PEROLEHAN

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 6

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. .

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Obyek perjanjian pinjam pakai
 - c. Jangka waktu
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
 - e. Penyelesaian perselisihan
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah bengkok kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah bengkok kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagalan Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan Keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUGUREJO

Tanggal : 2 Oktober 2023.

Kepala Desa TUGUREJO

SLAMET BUDIONO

Diundangkan pada lembaran Desa Tugurejo

Pada Tanggal 2 Oktober 2023.

Sekretaris Desa TUGUREJO

MUSYAFUDIN

LEMBARAN DESA TUGUREJO TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TUGUREJO
 NOMOR : 03 TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 Oktober 2023
 TENTANG : PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
 DAN PENATAAN TANAH BENGKOK
 BAGI KEPALA DESA , PERANGKAT
 DESA DAN TANAH KAS DESA

**PENETAPAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
 DAN TANAH KAS DESA**

NO	JABATAN	KELAS	BLOK/ PERSIL	C.DESA HAK PAKAI	LUAS (M2)	LOKASI (DUSUN)	KEGUNAAN
1	Kepala Desa	D2	009-135		4.200	Tugur	tegal
		D2	007-080		4.200	Kanggotan	tegal
		D2	006-141		14.000	Kanggotan	tegal
	Jumlah				22.400		
2	Sekretaris Desa	D2	009-147		4.100	Tugur	tegal
			007-082		1.000	Kanggotan	
	Jumlah				5.100		
4	Kaur Umum dan Tu	D2	007-082		1.000	Kanggotan	tegal
	Jumlah				1.000		
5	Kaur Keuangan	D2	006-141		1.000	Kanggotan	tegal
	Jumlah				1.000		
6	Kasi Pemerintahan	D2			1.100	Tugur	tegal
	Jumlah				1.100		
7	Kasi Kesejahteraan	D2	007-082		1.000	Kanggotan	tegal
	Jumlah				1.000		
8	Kasi Pelayanan	D2	007-082		1.000	Kanggotan	tegal
	Jumlah				1.000		
9	Kadus	D2	006-141		4.400	Kanggotan	tegal
	Jumlah				4.400		
JUMLAH KESELURUHAN TANAH BENGKOK & KAS DESA					37.000		

KEPALA DESA TUGUREJO

SLAMET BUDIONO

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : TUGUREJO
KECAMATAN : TEMPURAN
KABUPATEN : MAGELANG
TANGGAL : 3 OKTOBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TADA TANGAN
1	KHARIS MUSTOFA	KETUA	
2	RINI WULANDARI	SEKRETARIS	
3	MAKSUM	ANGGOTA	
4	MUHAMAD AKIRI BASRODIN	ANGGOTA	
5	SITI ROFIAH	ANGGOTA	

TUGUREJO, 3 Oktober 2023

KETERANGAN :

1. Jumlah Hadir : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : - Orang
4. Quorum : Memenuhi /
Tidak memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUGUREJO
KETUA

KHARIS MUSTOFA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN WINDUSARI
DESA TUGUREJO

Jl. Letkol Antón Misan No.01 Telp. 085 302 930 174 Kode Pos 56152

SURAT KETERANGAN
NO. 141 / 01 /20.15 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET BUDIONO.

Jabatan : Kepala Desa TUGUREJO

Menerangkan Bahwa Tanah Bengkok Kas Desa TUGUREJO ada yang Disewakan dan ada yang tidak Disewakan

Demikian Surat keterangan ini di buat guna seperlunya

TUGUREJO, 2 Oktober 2023

Kepala Desa TUGUREJO

SLAMET BUDIONO